

NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM DI PAKISTAN

Hj. AISYAH A.

Jurusan Perbandingan Agama
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Jalan Sultan Alauddin No. 36 Gowa
Email: aisyah@yahoo.com

Abstract

This article explores the issue of the establishment of Pakistan as an Islamic state. Its political process was initiated after the independence of India when the Indian governmental system was based on constitution which ignored the multi-ethnic and multi-religious community in India. Muslims as minority group in India at that time felt ignored and did not play significant role in the state government. After the world war I, political consolidation and movement to establish an Islamic state had been initiated by uniting support from Muslim leaders to form Indian Muslim League. The struggle to establish a new Islamic state was not in vain. Pakistan was a name to the new state with Islamic concepts as the main reference in governing its society. This new Islamic state, later on, dismissed the word 'Islam' and needed further rational and liberal redefinition on what the country should be led to.

Key words; *State, Islam, Pakistan*

I. PENDAHULUAN

Pada awalnya Pakistan merupakan bagian dari India yang mengalami penjajahan dari Inggris. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, India menjadi negara berdaulat dan merdeka, karena itu sistem pemerintahan diatur berdasarkan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi konflik kepentingan, serta perbedaan etnis dan agama yang menyebabkan pertikaian internal berkepanjangan antara penduduk yang beragama Islam dan Hindu-Budha, yang menyebabkan pertumpahan darah yang sulit untuk dihindari oleh kedua kelompok. Konflik kepentingan serta perbedaan tersebut kemudian menjadi embrio bagi lahirnya negara Pakistan yang berdaulat.

Pakistan yang berpenduduk 122,8 juta jiwa (perkiraan tahun 1993) adalah bangsa muslim terbesar kedua di dunia, dan memiliki latar belakang etnik yang cukup beragam, yakni Punjabi, Shindhi, Pathan, Baluch dan etnis India. Pakistan juga memiliki latar belakang agama yang beragam, mayoritas muslim (97 %), minoritas non muslim termasuk Kristen, Hindu, dan Persi.¹ Secara geografis Pakistan berbatasan dengan Uni Soviet di sebelah utara, di bagian barat berbatasan dengan Iran, bagian barat laut berbatasan langsung dengan Afghanistan, dan di Timur laut berbatasan langsung dengan Cina dan India. Bahasa persatuan adalah bahasa Urdu, sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan hasil utama negara di bidang perindustrian, berupa tekstil, pemrosesan

makanan, rokok, kimia, karpet, kerajinan kulit dan petrokimia. Selain itu berupa pertambangan seperti gas alam, minyak bumi, biji besi dan pertanian berupa kapas, beras dan gandum.²

Pakistan merupakan bagian dari India yang memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1947 setelah melalui perjuangan yang panjang baik dengan penjajahan Inggris maupun dengan kelompok Hindu sendiri. Dalam perjuangan ini berperan tokoh-tokoh diantaranya Sayyid Ahmad Khan yang mencetuskan gagasan komunalisme, yakni umat Islam perlu membentuk suatu kelompok yang berdiri sendiri. Ide ini muncul berdasarkan pengamatannya bahwa di India ada tiga kekuatan sosial, yaitu umat Islam sebagai minoritas, Hindu sebagai mayoritas dan Inggris mempunyai kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan.³ Umat Islam dan umat Hindu mewakili dua budaya dan cara hidup yang berbeda. Perbedaan ini terdapat di seluruh aspek kehidupan, seperti makanan, pakaian, literatur dan pola pikir. Umat Islam berhasil mempertahankan budaya mereka yang berbeda dan berhasil memelihara masyarakatnya secara utuh.

Umat Islam tidak mau menjadi masyarakat minoritas di negara India yang mayoritas orang Hindu. Oleh sebab itu, golongan Islam melalui organisasinya Liga Muslimin di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah, menuntut pemisahan diri dari India dan membentuk negara Islam yang berdiri sendiri.

II. Proses Terbentuknya Negara Islam Pakistan

Pemukiman pertama wilayah Balukistan yang merupakan salah satu wilayah

Pakistan sekarang, sudah ada dan berlangsung sejak tahun 3500 SM. Dari Balukistan para pemukim tersebut bergerak ke Timur menyusuri lembah sungai Indus. Mereka berinteraksi dengan bangsa Arya. Perpaduan ini kemudian lahir kerajaan Gandhara di Lembah Sungai Indus.

Hal ini diketahui berdasarkan catatan yang dibuat oleh orang Budha pada abad ke-6 dan 5 SM. Tahun 327 Alexander Agung menghancurkan kerajaan tersebut. Pakistan kemudian ditaklukkan dan menjadi bagian dari India pada masa kerajaan Muria pada abad ke-3 SM. Akhirnya daerah sungai Indus menerima pengaruh Hindu yang sangat kuat sekitar tahun 320-540 M. Akan tetapi daerah ini kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Islam sekitar abad ke-8 M, sehingga melemahkan pengaruh Hindu. Pada sekitar abad ke-13 M umat Islam mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya di seluruh wilayah India yang kini menjadi Pakistan serta membentuk kesultanan di sekitar New Delhi.⁴

Kaum muslimin mengenal daerah ini dengan sebutan Sind sejak tahun 711 M, ketika panglima Muhammad bin Qasim⁵ dari kerajaan Bani Umayya menyerbu wilayah ini. Selama tiga tahun pemerintahan Bani Umayya periode khalifah Al-Walid menduduki daerah ini tepatnya di daerah Indus bawah. Selanjutnya 300 tahun kemudian pasukan Abbasiyah di bawah pimpinan Mahmud Gazna (973-1073) anak panglima Turki Alptakan menggantikan dan menyempurnakan pendudukannya tahun 1030 M, ia mampu menguasai India Utara dan Lahore.⁶

Pada abad ke-16 Dinasti Mughal menguasai seluruh wilayah anak benua ini dengan rajanya yang pertama bernama Babur, keturunan Timur Lenk yang mulai memerintah tahun 1530. Akan tetapi kejayaan Mughal hancur bersamaan dengan masuknya Inggris di India. Pada tahun 1757, Serikat Dagang Hindia Timur Inggris menaklukkan kerajaan Mughal dan selama lebih dari seabad. Serikat Dagang ini

menguasai sebagian besar anak benua India. Tahun 1858 pemerintah Inggris mengambil alih tanggung jawab pemerintahan menyusul pemberontakan tentara asli India yang direkrut pasukan Bengal.⁷

Nasionalisme Pakistan berawal ketika terjadinya pertentangan antara Hindu dan Islam. Pertentangan ini terjadi karena umat Islam merasa bahwa mereka diabaikan oleh Kongres Nasional India Bersatu tahun 1885 yang di dominasi oleh orang-orang Hindu. Setelah perang dunia I, pihak Islam mulai melakukan gerakan dengan membangun konsolidasi internal dalam rangka menuntut kemerdekaan dan melepaskan diri dari India.⁸

Rencana pembentukan negara Islam merdeka yang lepas dari India, mendapat kecaman keras dari Jami'at al-Ulama (Perkumpulan Ulama-ulama India). Menurut mereka bahwa pembentukan negara Pakistan yang terpisah dari India tidak akan menyelesaikan masalah. Alasan tersebut didasarkan pada fakta bahwa di India terdapat banyak kaum muslimin yang telah lama hidup berdampingan dengan baik. Kaum agama tersebut melakukan persekutuan dengan para tuan tanah. Di bawah pemerintahan Inggris mereka dikukuhkan atas hak kepemilikan tanah mereka, melindungi dari persaingan kepentingan financial dengan pihak Hindu, bahkan beberapa tanah tambahan diberikan kepada mereka. Pada tahun 1945 Liga Muslim mendesak para pemuka agama bahwa apapun kepentingan lokal mereka, sebuah negara muslim yang dijalankan oleh muslim untuk mempertahankan prinsip-prinsip pola kehidupan muslim, mutlak diperlukan.

Ide tentang pembentukan negara tersendiri bagi umat Islam bermula dari Sayyid Ahmad Khan ketika beliau mencetuskan gagasan komunalisme (kelompok umat Islam yang berdiri sendiri). Gagasan ini dikembangkan sebagai rumusan Pakistan dalam pengertian sebuah negara tersendiri bagi umat Islam, pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Iqbal, ia mengatakan bahwa India pada hakekatnya tersusun dari dua bangsa yang besar yaitu bangsa Islam dan bangsa Hindu. Umat Islam India harus menuju pada pembentukan negara tersendiri terpisah dari negara Hindu di India. Tujuan pembentukan negara tersendiri ini ditegaskan dalam rapat tahunan Liga Muslim tahun 1930 yakni "saya ingin melihat Punjab, daerah perbatasan utara, Sindhi dan Balukhistan, bergabung menjadi satu negara" Disinilah ide pembentukan negara tersendiri diumumkan secara resmi. Kemudian menjadi tujuan perjuangan nasional umat Islam India.⁹ Oleh karena itu wajar kalau Iqbal di pandang sebagai Bapak Pakistan, tugas Ali Jinnah adalah mewujudkan cita-cita menjadi negara Islam Pakistan yang berdaulat.

Perjuangan Muhammad Ali Jinnah mewujudkan cita-cita tersebut di atas diawali dengan perjuangannya bersama dengan Liga Muslim untuk bekerjasama dengan partai Kongres Nasional dan para pemimpinnya. Tetapi lama kelamaan ia melihat bahwa sangat sulit untuk menciptakan nasionalitas antara orang Hindu dan orang muslim, karena dia melihat realita yang berkembang dalam masyarakat India.¹⁰

Pada tahun 1913 M. Muhammad Ali Jinnah masuk Liga Muslim India, dan tahun itu juga terpilih menjadi Presiden Liga Muslim. Pada saat Ghandi mengeluarkan konsep nasionalisme India yang di dalamnya bergabung umat Islam dengan Hindu menjadi satu bangsa, Ali Jinnah mengundurkan diri dari Liga Muslim dan menetap di London sebagai pengacara. Setelah Liga Muslim membutuhkan pemimpin yang lebih aktif, beliau diminta untuk pulang oleh teman-temannya, kemudian beliau dipilih kembali

untuk memimpin Liga Muslim. Berkat kepemimpinannya Liga Muslim menjadi gerakan yang lebih kuat.¹¹

Setelah memimpin Liga Muslim, Ali Jinnah mengawali kegiatannya dengan menyusun langkah-langkah baru memperjuangkan pemerintahan independen untuk muslim India, kemudian melakukan konsolidasi bagi Liga Muslim dengan mengadakan sidang tahunan di Bombay pada bulan April 1936, yang bertujuan untuk menyempurnakan anggaran dasar organisasi yang lebih demokratis. Selanjutnya menyusun organisasi untuk menghadapi pemilihan dewan *pusat* dan *propinsi*. Kemudian mengadakan kunjungan ke daerah-daerah untuk mendapatkan dukungan bagi kandidat dari Liga Muslim.¹²

Langkah awal Ali Jinnah belum mampu memperlihatkan kekuatan yang berarti, kenyataannya Liga Muslim kalah dalam pemilihan majelis propinsi tahun 1937 partai kongres yang mendominasi kursi majelis. Ketika itu Nehru mengatakan dengan sombongnya bahwa India hanya dua partai yaitu partai kongres dan pemerintah Inggris. Di sini nampak jelas bahwa Liga Muslim seakan-akan tidak ada. Inilah yang menjadi pendorong pertentangan yang tajam antara Hindu dan Islam, serta semakin tersudutnya umat Islam dalam kancah politik. Namun Ali Jinnah tidak gampang menyerah. Menurutnyalah alternatif yang paling tepat bagi penyelesaian Hindu dan Islam di India adalah adanya tanah air tersendiri bagi umat Islam.¹³ Dari sinilah umat Islam berjuang demi lahirnya negara Islam.

Persetujuan mengenai pembentukan negara tersendiri untuk umat Islam India sebagai tujuan perjuangan Liga Muslim, dibahas dalam rapat tahunan Liga Muslim tahun 1940, sidang kemudian menyetujuinya, dengan memberi nama negara dengan nama Pakistan. Tentang nama Pakistan menurut salah satu sumber berasal dari seorang mahasiswa India di London bernama Khaidri Rahmat Ali, ia sangat tertarik dengan pidato Iqbal mengenai konsep negara muslim. Ia mengumpulkan huruf awal dari lima wilayah yaitu "P" diambil dari Punjab, "A" dari Afghanistan, "K" dari Kasmir, "S" dari Shindi, "Tan" dari Baluchistan. Sumber lain menyatakan bahwa Pakistan berasal dari kata Persi yaitu "Pak" berarti suci, dan "Stan" berarti negara, jadi Pakistan berarti negara suci.¹⁴

Dengan dasar persetujuan yang jelas ini, Liga Muslim mendapat sokongan yang luar biasa dari umat Islam dan kedudukannya semakin bertambah kuat. Sebaliknya, tokoh-tokoh muslim yang bernaung di bawah partai Kongres Nasional India kehilangan pengaruh, bahkan sebagian mereka meninggalkan partai Kongres kemudian bergabung dengan Liga Muslim. Dengan demikian Jinnah dan Liga Muslim semakin bertambah kuat, terlihat dari hasil perolehan suara terbanyak di beberapa daerah dalam pemilihan tahun 1946.¹⁵

Pengaruh gerakan Liga Muslim yang dipimpin oleh Ali Jinnah merupakan pukulan bagi para tokoh partai Kongres. Dengan demikian mereka berupaya dengan gigih membendung pengaruh gerakan tersebut. Pada tahun 1944 terjadi perundingan yang sengit antara Ali Jinnah dengan Ghandi mengenai aksi bersama terhadap Inggris, tetapi karena perbedaan pendapat tentang masa depan India, akhirnya perjumpaan itu tidak membawa hasil. Pada tahun itu juga Ali Jinnah memaparkan dua masalah penting yang berkaitan dengan Pakistan. Kedua masalah ini adalah geografi Pakistan dan bentuk pemerintahannya. Rencana bentuk pemerintahannya adalah **demokrasi**.¹⁶

Pada tahun 1945 M. Inggris mulai mengadakan pembicaraan mengenai kemerdekaan India, namun selalu mengalami kegagalan. Pada akhirnya Inggris memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara yang ditentukan oleh Inggris. Usaha ini ditentang oleh Ali Jinnah, karena penyusunan pemerintahan sementara dilakukan dengan sepihak, sehingga menimbulkan huru-hara. Menurut Ali Jinnah dengan situasi seperti ini tidak mungkin diadakan sidang Dewan Konstitusi pada bulan Desember 1946. Setahun kemudian keluarlah putusan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan kepada dua dewan konstitusi, satu untuk Pakistan dan satu untuk India. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Dewan Konstitusi Pakistan dibuka dengan resmi, dan keesokan harinya tanggal 15 Agustus 1947 Pakistan lahir sebagai negara berdaulat bagi umat Islam India. Ali Jinnah diangkat menjadi Gubernur Jendral dan mendapat gelar Qaid-i- Azam (pemimpin besar) dari rakyat Pakistan.

Sejak berdirinya negara Pakistan, umat Islam mencoba menerapkan konsep Islam tentang sebuah negara. Mereka memasuki masa pencarian yang terus menerus tentang apa sebenarnya negara Islam itu. Persoalan itu merupakan bahan polemik yang berkepanjangan di kalangan tokoh-tokoh Islam, baik yang berpendidikan Barat maupun ulama.

Sistem pemerintahan diajukan oleh Majelis Nasional dengan berpedoman kepada Rancangan Undang-Undang hasil sidang Liga Muslim pada bulan Maret 1940, yaitu harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Di samping itu dikeluarkan keputusan yang berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan undang-undang tersebut yang antara lain memuat prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak kebebasan, persamaan, toleransi dan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.¹⁷

Sistem pemerintahan yang dirumuskan Liga Muslim tahun 1940 itu disahkan menjadi konstitusi tahun 1956. Dalam konstitusi itu negara bernama "Republik Islam Pakistan". Akibatnya negara mengalami kesulitan dalam mendefinisikan keislamannya. Perdebatan-perdebatan dalam majelis Konstituante, demikian pula hasil-hasil kompromi antara kubu tradisional dan modernis yang terjelma dalam konstitusi tahun 1956, dalam konstitusi ini negara bernama "Republik Islam Pakistan" amandemen-amandemennya tidak memuaskan semua pihak.

Akan tetapi pada tahun 1962 konstitusi ini kemudian ditinjau kembali yang antara lain menghilangkan kata "Islam" dari konstitusi tersebut, dan sebagai imbangannya didirikan dua lembaga, yakni Dewan penasehat Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam. Tujuan dari Lembaga Penelitian ini adalah untuk memberikan pendefinisian terhadap hal-hal yang pokok dalam Islam dengan cara yang rasional dan liberal sehingga dapat melahirkan watak yang dinamis dalam hubungannya dengan kemajuan intelektual dan ilmiah yang terdapat di dunia modern.¹⁸

Ketika sampai kepada hukum Islam, kesulitan yang sama juga dihadapi kaum muslim Pakistan terutama oleh Lembaga Penelitian Islam Pakistan dan Dewan Penasehat Ideologi Pakistan itu sendiri. Dalam benak kaum modernis, hukum Islam bisa diterapkan jika dimodernisasi selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Sementara kaum tradisional menuntut bahwa fiqhi yang dihasilkan para mujtahid lewat deduksi dan derivasi dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, harus diberlakukan tanpa kecuali. Kontroversi tentang riba dan bunga bank, pendayagunaan zakat, program keluarga berencana, hukum kekeluargaan Islam dan

lainnya merupakan cerminan betapa sulitnya kaum muslim Pakistan mendefinisikan syariat Islam untuk konteks negeri mereka.¹⁹

Dalam kasus program keluarga berencana, misalnya kelompok modernis mendukung gagasan kontrol penduduk untuk negara Pakistan yang memiliki populasi dan angka kelahiran tinggi. Lembaga Riset Islam yang didirikan oleh Zia-ul-Haq menerjemahkan fatwa Mahmud Syaltut, Syaikh al-Azhar yang mendukung program tersebut. Tetapi kelompok tradisional menegaskan bahwa Islam tidak mendukung gagasan kontrol penduduk. Penggunaan alat-alat kontrasepsi menurut mereka akan mengarah kepada indiskriminasi hubungan seksual. Bahkan dalam sebuah konferensi ulama, dinyatakan bahwa Firaun telah membunuh anak laki-laki Bani Israil, sementara orang-orang Pagan telah membunuh anak-anak wanitanya, maka pemerintah Pakistan lebih buruk lagi, lewat program keluarga berencana mereka telah membunuh baik anak laki-laki maupun perempuan.²⁰

Dalam perdebatan yang seru itu, kaum modernis sulit memutuskan kaitannya dengan masa lampau dalam menerima nilai-nilai modern. Sementara kaum tradisional juga menemui kesulitan membebaskan diri secara total dari masa kini dan mencari perlindungan yang aman di masa lampau. Kaum modernis menuduh kaum tradisional menyembah sejarah bukan Tuhan, lantaran kecenderungan mereka dalam menghidupkan masa silam. Sebaliknya kalangan tradisional menuduh kubu modernis memiliki keyakinan buruk karena memandang defenisi mekanis syariat Islam dalam term-term Barat modern adalah yang terbaik, dan menolak keberatan terhadap otoritas masa lampau yang tidak dapat diganggu gugat. Akibatnya adalah kekacauan dan kekacauan dalam defenisi Islam yang menyertai pengalaman kenegaraan Pakistan. Kompromi-kompromi yang dicapai tentu saja tidak selaras dengan modernisasi yang dikehendaki kubu modernis ataupun status quo yang hendak dipertahankan oleh kelompok tradisional. Ajang kontraversi akhirnya melebar kepada aksi-aksi antara lain penjarahan, pembakaran, terorisme dan pembunuhan. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Muhammad Ayub Khan.²¹

Muhammad Ayub Khan kemudian digantikan oleh Zulfikar Ali Bhuto. seorang tokoh kuat Pakistan yang baru, yang membawa penafsiran dan tawaran baru bagi pengembangan negara Pakistan. Ia memadukan konsep Islam dengan sosialisme, terutama dalam hal keadilan sosial. Di bawah pemerintahannya diadakan pemilihan umum pertama tahun 1977. Menjelang pemilu, ia mendatangkan imam masjid Nabawi dan imam Masjid al-Haram ke Pakistan. Ia mewajibkan setiap hotel kelas satu meletakkan Al-Qur'an di tiap kamar, ia juga menutup klub malam, tempat judi, dan penjualan alkohol. Pemilu ini melahirkan pertentangan sengit menyusul ketidakpuasan partai oposisi karena partai Bhuto memperoleh 155 dari 200 kursi yang diperebutkan untuk menjadi anggota Dewan Rakyat yang seluruhnya berjumlah 216 orang. Protes berkepanjangan menyebabkan Bhuto mengeluarkan undang-undang darurat dan memerintah dengan tangan besi.²²

Untuk mengatasi kekacauan lebih lanjut, pihak militer di bawah Jendral Muhammad Zia-ul-Haq, Kepala Staf Angkatan Darat menggulingkan Bhuto dan mengambil alih kekuasaan pada tahun 1977. Bhuto dituduh membunuh lawan politiknya tahun 1974, untuk itu Zia-ul-Haq menyeretnya ke tiang gantung pada 4 April 1979.

Zia-ul-Haq adalah seorang muslim yang taat, beliau memperkenalkan Nizam al-Islam (peraturan Islam). Atau islamisasi Pakistan. Pada bulan Februari 1979 ia mengumumkan berlakunya hukum Islam. Selain itu ia membentuk suatu institusi

yang memberikan cara mendapatkan keadilan dengan mudah kepada perorangan yang mempunyai keluhan terhadap tindakan pejabat pemerintahan federal. Kantor ini didirikan pada 24 Januari 1983 dengan nama Perintah Wafiki Mohtasib (Federal Ombudsman), dalam masa dua tahun saja telah menyelesaikan keluhan sebanyak 94.500 dari 105.500.²³ Juga banyak melontarkan gagasan tentang transformasi struktur sosial, ekonomi dan politik disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain dari perubahan yang dilakukannya dari berbagai aspek, Zia-ul-Haq juga dipandang sebagai seorang yang diktator, karena di samping menghukum gantung Ali Bhuto, ia juga memenjarakan setiap pendukung Ali Bhuto, termasuk putrinya Benazir Bhuto yang masuk keluar penjara karena menentang kediktatoran itu. Pada tahun 1982, Benazir Bhuto diusir dari Pakistan setelah dipenjarakan selama 3 tahun. Selanjutnya ia pergi ke London menyusun kekuatan, dan pada tahun 1986 ia kembali ke Pakistan untuk menentang rezim Zia-ul-Haq.²⁴ Tanggal 17 Agustus 1988 Zia-ul-Haq tewas bersama dengan duta besar dan atase militer Amerika Serikat dalam pesawat C-130 yang meledak di Pakistan Tengah. Dan semakin mempermudah Partai Rakyat Pakistan (*Pakistan People's Party/PPP*), di bawah Benazir Bhuto putri Zul-Fikar Ali Bhuto memenangkan pemilihan umum.²⁵

Pada tahun 1988 Benazir Bhuto tampil menjadi perdana menteri Pakistan setelah partai rakyat Pakistan yang dipimpinya menang atas Aliansi Demokrasi Islam (Islamic Democratic Aliances/IDA). Dengan demikian, Pakistan yang sebelumnya menganggap wanita tidak boleh dijadikan sebagai kepala negara, mengukir sejarah penting bagi perkembangan Islam. Dia adalah perdana Menteri perempuan pertama di dunia Islam era modern, sekalipun ulama Pakistan masih mengharamkan kepemimpinan perempuan. Pada tahun 1990, ia dijatuhkan dengan tuduhan korupsi dan digantikan oleh Nawaz Sharif, seorang pengagum Zia-ul-Haq dari partai Aliansi Demokrasi Islam (IDA). Nawaz Sharif mengakhiri kepemimpinannya setelah dikudeta oleh Perves Musharraf pada tahun 1999. Pada tahun 2001 Perves Musharraf menyatakan diri sebagai Presiden Pakistan.²⁶

Pada tahun 2007 para pemimpin oposisi dalam sebuah konferensi yang dihadiri oleh 38 perwakilan partai mendesak Presiden Perves Musharraf untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena peraturan militer Presiden Musharraf terbukti telah membawa Pakistan ke jurang kehancuran, perpecahan dan kerusuhan. Parlemen Pakistan sendiri sudah dipinggirkan dan tidak punya kekuatan lagi. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengizinkan mantan perdana menteri Benazir Bhuto dan Nawab Sharif agar dapat kembali ke Pakistan.

Krisis itu berawal ketika dua madrasah di Pakistan yaitu Jamiah Hafsa dan Jamiah Faridia mengumumkan penerapan syariat Islam di seluruh Pakistan. Tokoh utama madrasah itu adalah Maulana Abdul Rashid Ghazi. Mereka terdorong menerapkan syariat Islam, karena menganggap pemerintah Pakistan telah gagal mengatasi masalah pelacuran dan tindak kriminal lainnya. Persoalan ini mengemuka setelah para santri putri dari kedua madrasah itu menyandera tiga perempuan dan satu laki-laki pada tanggal 30 Maret 2007, karena mereka menduga sebagai pengelola tempat pelacuran di sebuah kawasan kalangan menengah di Islamabad²⁷

Hubungan pihak pemerintah (Presiden Perves Musharraf) dengan Maulana Abdul Rashid Ghazi terus memburuk, sampai pada desakan agar Musharraf diadili di Pengadilan Syari'ah. Musharraf yang berlatar belakang militer dan dekat dengan Amerika tentu saja menolak. Suasana semakin meruncing tatkala aparat pemerintah

melakukan penghancuran tujuh mesjid dengan alasan illegal. Saat itu suasana semakin panas hingga berujung pada pengepungan Mesjid Merah dan madrasah pada tanggal 3 Juli 2007. Sebaliknya, para santri dan pengasuh menilai dirinya kini telah berhadapan dengan pemerintah Pakistan dan wajib hukumnya melancarkan aksi perlawanan yang dinilainya sebagai *amar ma'ruf nahi mungkar* dan berakhir dengan tewasnya Maulana Abdul Rashid Ghazi dan ibu kandungnya serta 160 santri.²⁸

Serangan pasukan Pakistan terhadap mesjid dan madrasah itu membuat Presiden Musharraf menghadapi instabilitas yang semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu yang mendorong Presiden Musharraf menetapkan keadaan darurat pada tanggal 3 Nofember 2007.

Ketika itu, Benazir Bhuto kembali ke Pakistan pada Oktober 2007 adalah atas dorongan Gedung Putih agar mau berunding dengan Presiden Pervez Musharraf, tangan kanan Amerika dalam upaya memerangi terorisme, sebagai bagian dari kepentingan politik global Amerika. Belum ada kesepakatan apa-apa dengan Musharraf, Benazir telah bersimbah darah. Dia mati secara tragis pada 27 Desember 2007 saat berkampanye untuk Pakistan People's Party (PPP). Sebuah fakta yang tidak asing dalam perpolitikan Pakistan. Siapa pembunuh perempuan yang berbakat itu, belum ada kesimpulan final. Tetapi sebagian dari filosof politik kaum fundamentalis yang memandang enteng kematian orang dan kematian diri sendiri, tidak mustahil bahwa yang menyudahi nyawa Benazir Bhuto adalah kelompok ini, sebutlah neo-Khawarij di era sekarang.²⁹

Dari uraian ini dapat dilihat bahwa Amerika adalah negara yang bertanggung jawab bagi munculnya kediktatoran di Pakistan sambil menghancurkan demokrasi. Padahal sistem demokrasilah yang dapat menyelamatkan negara Pakistan dari keadaan penuh bahaya. Sebagai anak Timur dan Barat Benazir Bhuto diilhami oleh rasionalisme, toleransi, dan progresivisme. Akhirnya di mata fundamentalis Benazir adalah sekuler dan pro Barat. Oleh sebab itu darahnya menjadi halal. Namun segala kelemahan dan kekurangannya, kemunculan Benazir dan PPP di panggung politik Pakistan adalah bukti bahwa fatwa ulama mengenai haramnya kepemimpinan perempuan telah semakin kehilangan otoritasnya. Oleh karena itu perlu diadakan kajian mendalam tentang masalah gender, agar perempuan tidak lagi diperlakukan sebagai pihak yang lemah. Kini dunia telah berubah.

III. Peradaban Islam di Pakistan.

Kecenderungan terhadap ilmu pengetahuan sebenarnya sudah cukup lama diperlihatkan masyarakat Pakistan yang dulunya masih menyatu dengan India. Menurut fakta sejarah, semenjak kerajaan Ghaznawi hal ini telah menjadi prioritas utama kerajaan dalam mengumpulkan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Antara tahun 1030 M sampai berakhirnya pemerintahan Ghaznawi 1186 M, banyak para sarjana, penyair, guru-guru sufi dari kota-kota Asia Tengah seperti Iran, wilayah Arab termasuk Samarkand, Bukhara, Kasghar, Naisabur dan Bagdad tertari untuk tinggal di Lahore. Mereka mengisi daerah-daerah baru kaum muslimin dengan berbagai pengalaman dan potensi yang telah dikembangkan di daerah sebelumnya. Dan antusias sultan-sultan Ghaznawi memakai pola administrasi dan cultural Persia, secara umum mendukung pembangunan peradaban ini dan menghentikan tradisi pengelana dan penjelajah wilayah.³⁰

Mahmud Ghazna selain ahli dalam bidang peperangan, juga ia termasyhur dalam pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang pencinta ilmu pengetahuan dan sangat menghormati para sarjana. Ghazna bukan saja sebagai tempat pertahanan perang, tetapi juga merupakan berkumpulnya ahli hukum, ulama, ahli fikhi, bahasa, tasawuf, filsafat. Karena itu pada masanya pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Hal ini ditandai antara lain dengan pembangunan masjid yang sangat besar di dalamnya di bangun madrasah-madrasah serta dilengkapi perpustakaan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ia menghimpun para sarjana dan para pujangga. Mereka ditempatkan di dalam istananya sendiri. Mereka dibiayai dan didukung untuk mengembangkan dan melakukan penyelidikan-penyelidikan ilmiah. Di antara ilmuwan tersebut adalah Al-Biruni dan al-Firdausi.³¹

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa sebelum India berpisah dengan Pakistan, semasa kerajaan Ghaznawi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat. Kecenderungan para sultan terhadap ilmu pengetahuan sangat tinggi. Hal ini berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan sesudahnya. Dikatakan demikian karena dasar-dasar pengetahuan itu telah diletakkan oleh para ulama dan ilmuwan dalam berbagai cabang ilmu. Tidak mengherankan bila kemudian di Pakistan terdapat sederet ulama dan pemikir yang cukup terkenal.

Pada abad modern seperti sekarang ini, kecenderungan pada pembangunan dan pengkajian agama tetap berlanjut. Hal itu terlihat dalam pendirian perguruan-perguruan tinggi seperti universitas Baluchistan, Universitas Pertanian Faisalabad, Government College Lahore. Di samping itu Pakistan memiliki lembaga pengkajian ilmu-ilmu Islam yang merupakan sumbangan yang amat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam di antaranya: 1) Yayasan Ilmu Pengetahuan Pakistan. 2) Akademi Ilmu-ilmu Pengetahuan Pakistan. 3) Pakistan Philosophical Congress. 4) Internasional Islamic Philosophical Association. 5) Inter nasional Iqbal Forum. 6) Academic Centre. 7) Wes Pakistan Urdu Academy.³²

Pengkajian ilmu-ilmu keislaman tersebut masih berlangsung sampai saat ini, dan Pakistan tercatat sebagai pengkajian paling aktif tentang masalah keislaman dan filsafat.

Budaya keilmuan di Pakistan telah melahirkan sejumlah ilmuwan muslim yang berkaliber internasional, Di antaranya Muhammad Iqbal (1873-1938), Abu A'la al-Maududi (1903-1979) tokoh pemikir yang cenderung ortodoks dan tradisional; M.M. Syarif (1893-1965) pendiri Pakistan Philosophical Congress, juga Editor *History of Muslim Philosophy*, salah satu buku terbaik untuk sejarah filsafat saat ini. CA. Qadir (lahir th 1909) salah seorang pendiri Pakistan Philosophical Congress dan penulis buku *Philosophy and Science in the Islamic World*. Dr. Abdus Salam (lahir th 1926) penerima hadiah nobel di bidang fisika tahun 1979. Fazlurrahman, guru besar ilmu Agama Islam di Universitas Chicago Amerika Serikat.³³ Dengan demikian Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian dan intelektual muslim, tokoh politik dan ilmuwan terkenal yang memberikan kontribusi positif bukan saja bagi Pakistan namun juga bagi dunia Islam. Sayyid Qutub, tokoh Ikhwanul Muslim Mesir pernah mengatakan bahwa kini telah muncul dua kekuatan besar Islam, yakni Indonesia (Asia Tenggara) dan Pakistan (Asia Selatan). Kekuatan militer negara Pakistan ini juga

diperhitungkan oleh dunia dengan adanya dugaan bahwa negara Pakistan mempunyai kemampuan persenjataan nuklir. Bahkan Amerika menilai Pakistan, sebagai negara “Bom Islam” (Islamic Bomb)

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbentuknya negara Islam Pakistan merupakan hasil perjuangan yang cukup panjang. Hal itu dilatarbelakangi oleh perseteruan antara tiga kekuatan sosial, yaitu Hindu yang menjadi mayoritas di India, kaum muslimin India yang minoritas dan Inggris sebagai penjajah dengan kekuatan politik dan teknologi modern yang dimilikinya. Sehingga sangat sulit mewujudkan “negara kesatuan India” seperti yang disampaikan oleh Nehru. Perseteruan keras yang terjadi antara kaum muslimin India dan kaum Hindu India mendorong Inggris mengambil jalan tengah dengan melaksanakan konferensi antara pihak muslim India dan kaum Hindu India, namun gagal mencapai mufakat. Karena Muslim India merasa hak-haknya terabaikan. Melalui Liga Muslim India, Muhammad Ali Jinnah menyampaikan teori “dua bangsa” dan secara resmi menyampaikan tuntutan sebuah tanah air Muslim yang terpisah dari India. Dalam resolusi tahun 1940 Liga Muslim menyampaikan pembentukan negara Pakistan merdeka dan berdaulat penuh. Dengan berbagai perjuangan yang dilakukannya tanggal 15 Agustus 1947 Pakistan lahir sebagai negara berdaulat penuh untuk umat Islam India.
2. Islam dan umat Islam di Pakistan telah memberikan kontribusi secara nyata dalam perkembangan peradaban di dunia Islam. Pakistan merupakan suatu negara yang mengambil Islam sebagai sumber hukum telah menjadi fenomena tersendiri dalam kajian tentang hubungan negara dan agama dalam Islam. Pakistan melahirkan banyak tokoh intelektual muslim diantaranya Muhammad Iqbal sebagai penggagas utama berdirinya negara Pakistan, Muhammad Ali Jinnah dan Fazlurrahman.

Endnotes

¹Lihat B. Setiawan dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid XII , (Cet I, Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 39. Lihat juga Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam* ,(Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h.211.

²Ibid, h.40.

³Lihat Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* , Jilid IV, (Cet.IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997), h. 72.

⁴Lihat B. Setiawan dkk, *Ensikloedi Nasional Indonesia*, Jilid XII (Cet. I: Jakarta PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), h.40

⁵Kedatangan panglima Muhammad Qasim bersama tentaranya menandai awal pemerintahan Muslim pertama di anak benua ini. Pengamanannya atas daerah ini dan pertanyaannya kepada khalifah di Damaskus tentang bagaimana bersikap kepada orang Asing yang bukan ahlul kitab tetapi mau membayar upeti dan mau hidup damai dengan kaum muslim, memperluas kategori legal (dzimmi) ini mencakup orang Hindu dan Budha. Lihat Ismail Razi Al-Faruqi dan Lois Lamy Al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dengan judul *Atlas Budaya Islam Menjelajah Peradaban Gemilang*, (Cet.III; Bandung: Mizan, 2001), h. 258.

⁶Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam MeLacak Akar-Akar Sejarah Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, (Cet I; Jakarta:PT> Raja Grafindo Persada , 2004), h. 199

⁷Ibid

⁸B Setiakawan dkk, *Op. cit*, h. 40

⁹Harun Nasutin, *Pembaharuan Dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 194.

¹⁰Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Loc. cit*

¹¹Harun, Nasution, *Op. Cit*, h. 197

¹²Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1993), h.54 - 55.

¹³Zainuddin Sardar, *The Future of Muslim Civilization*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, dengan judul *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, (Cet.IV, Bandung: Mizan, 1993), h. 140

¹⁴Harun Nasution, *Op. Cit*, h. 194

¹⁵Ibid, h. 198. Lihat juga Ira M. Lapidus, *A History of Islam Societies*, , diterjemahkan oleh Ghufroon Mas'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200), h. 294

¹⁶Wilfred C. Smith, *Islam In Modern History*, diterjemahkan oleh Bharatara dengan judul, *Dunia Islam Modern*, (Jakarta: T. Penerbit, 1979), h.352.

¹⁷Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Loc. cit*

¹⁸John L. Esposito, *Islam And Develoment Religion and Sosiopolitical Change*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik* (Cet. I.;Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 224.

¹⁹Taufik Adnan Amal, "Pelajaran Berharga dari Pakistan", *Dalam Islam Liberal Com*, tanggal 5 Juni 2011, [http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran berharga dari Pakistan](http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran%20berharga%20dari%20Pakistan).

²⁰Ibid.

²¹Lihat Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), h. 228.

²²Lihat Dewan Redaksi, *Op. Cit*, h. 40

²³Lihat Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), h. 230. Lihat juga Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. cit*, h72

²⁴Ahmad Syafi'I Maarif, "Benazir Bhuto Tentang Dunia Islam" dalam *Muhammadiyah Online*. Tanggal 16 April 2008

²⁵Ibid.

²⁶Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Loc. cit*

²⁷Lihat [www. Syabab. Com](http://www.Syabab.Com), tanggal 10 Mei 2011

²⁸Ibid

²⁹Ahmad Syafi'I Maarif, *Loc. Cit.*

³⁰Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.,147.

³¹Al-Biruni nama lengkapnya adalah Abu al-Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni. Ia lahir di kota Kath pada tahun 362 H/973 M. Di kalangan orientalis ia disebut sebagai seorang ilmuwan terbesar dan seorang eksperimentalis ilmu alam yang amat tekun pada abad pertengahan Islam. Ia menguasai bidang matematika, kedokteran, farmasi, astronomi, dan fisika. Ia juga seorang ahli sejarah, geografi, kronologi, bahasa, pengamat adat istiadat dan system kepercayaan. Di samping itu ia seorang ahli agama, seorang filosof. Al-Biruni menciptakan teori ketiga sudut dari segitiga besarnya 180 derajat. Sedangkan Al-Firdasi (w. 1070) adalah seorang sastra Persia. Ia juga seorang penyair besar di zamannya. Ia juga membuat karya besar yaitu Shah Nameh. Karya ini memuat tentang legenda-legenda para raja dari kerajaan. Lihat Musyrifah Susanto, *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 177-179.

³²Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. cit*, h. 74.

³³Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, *Loc. cit*

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan,1993
- Amal, Taufik Adnan, "Pelajaran Berharga dari Paistan." Dalam *Islam Liberal Co*, Tanggal 5 Juni 2001, [http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran berharga dari Pakistan](http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran%20berharga%20dari%20Pakistan). (diambil pada tanggal 5 Juni 2011)
- C Smith. Wilfred, *Islam In Modern History*, diterjemahkan oleh Bharatara dengan Judul *Dunia Islam Modern*, Jakarta : t.penerbit, 1997.
- Esposito. L. Jhon, *Islam And Development Religion And Sociopolitical Change*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin dengan judul "*Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*", Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang,
- Yatim. Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Lapidus.M Ira, *A History of Islam Societies*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi Dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam*
- Nasution. Harun, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Redaksi. Dewan. *Ensiklopedi Islam*, Jilid. IV, Cet. IV; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1997.
- Setiawan dkk. B, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid. XII, Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Sadzali. Munawir, *Islam dan Tata Negara dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indo Indonesia Press, 1993.
- Susanto. Musyrifah, *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Cet. I, Bogor: Kencana, 2003.
- Maa'rif. Syafi'I. Ahmad, *Benazir Bhoto tentang dunia Islam*, Dalam *Muhammadiyah*

Online, tanggal 16 April 2011.
Thohir. Ajid, *Studi Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali, 2009
Zardar Zainuddin, *The Future Of Muslim Civiisation*, diterjemahkan oleh Rahman
Astuti dengan judul *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Cet. IV,
Bandung: Mizan, 1993.

Website

www, Yahoo, Sejarah Pakistan Com
www. Syabab. Com. Tanggal 10 Mei 2011
http: / fid, Welki. Wikipedia org wiki/ Pakistan